DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAKIP DPMPTSP PROVINSI KEPRI TAHUN 2026



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KATA PENGANTAR

Kata pengantar ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Penyusunan LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran, sekaligus sebagai instrumen untuk menilai capaian kinerja organisasi secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan kinerja pemerintahan daerah.

LAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan. Dalam pelaporan ini, capaian kinerja dijabarkan berdasarkan sasaran dan indikator yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 serta mengacu pada arah kebijakan dalam Renstra Tahun 2025–2029 sebagai periode transisi perencanaan. Dengan demikian, laporan ini menggambarkan kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai media informasi kepada pimpinan daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat mengenai kinerja pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara profesional dan akuntabel.Akhir kata, diharapkan LAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja organisasi, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada masa mendatang, demi terwujudnya pelayanan publik dan iklim penanaman modal yang semakin baik di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjung Pinang, Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19690329 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……

DAFTAR ISI……

RINGKASAN EKSEKUTIF……

BAB I PENDAHULUAN…… 1

A. Latar Belakang…… 1

B. Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP…… 2

C. Peran Strategis DPMPTSP…… 5

D. Perencanaan Startegis DPMPTSP Tahun 2021-2026…… 5

E. Tujuan DPMPTSP Tahun 2021-2026…… 6

F. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP…… 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA…… 9

A. Rencana Kerja Tahunan DPMPTSP…… 9

B. Perjanjian Kinerja DPMPTSP…… 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…… 12

A. Capaian Kinerja DPMPTSP Provinsi Kepri Tahun 2025 Berdasarkan PK…. 12

B. Capaian Kinerja DPMPTSP Provinsi Kepri Tahun 2025 Berdasarkan PK P 50

C. Analisis Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan Indikator SMART…….. 67

BAB IV PENUTUP…… 69

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini menjadi bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah berbasis investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga serta didukung oleh kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan perdagangan bebas. Kondisi ini menjadikan investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berlandaskan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 serta didukung oleh struktur organisasi yang disederhanakan sesuai kebijakan penyederhanaan birokrasi. Organisasi ini menjalankan fungsi perencanaan, promosi, pelayanan, pengendalian, serta pengelolaan data penanaman modal secara terintegrasi guna mendukung peningkatan realisasi investasi dan kualitas usaha di daerah.

Perencanaan strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029 disusun selaras dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan kebijakan nasional di bidang penanaman modal. DPMPTSP menjadi bagian dari misi pembangunan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah. Fokus kebijakan diarahkan pada pengembangan iklim investasi, promosi penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta penguatan tata kelola penanaman modal.

Pada Tahun Anggaran 2025, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan enam program utama yang dijabarkan ke dalam 13 kegiatan dan 33 subkegiatan. Program-program tersebut mencakup penunjang urusan pemerintahan daerah, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Perencanaan kinerja tahunan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Sasaran strategis yang ditetapkan meliputi meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kualitas layanan PTSP, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian yang sangat baik. Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mencapai Rp64,675 miliar atau 318 persen dari target awal sebesar Rp20,305 miliar. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan PTSP tercatat sebesar 86,93 atau 102,03 persen dari target, sedangkan nilai SAKIP DPMPTSP meningkat dari kategori BB menjadi A. Seluruh indikator kinerja utama berada pada kategori “sangat baik”.

Dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, realisasi investasi Tahun 2025 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan, khususnya sejak tahun 2024. Selain itu, realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau juga berhasil melampaui target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 111,71 persen, menegaskan posisi strategis Kepri dalam peta investasi nasional.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh berbagai faktor keberhasilan, antara lain posisi geografis yang strategis, keberadaan kawasan industri dan kawasan perdagangan bebas, dukungan kebijakan nasional, stabilitas ekonomi daerah, serta optimalisasi pelayanan perizinan melalui sistem OSS berbasis risiko. DPMPTSP juga berperan aktif dalam promosi investasi, fasilitasi investor, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Ke depan, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau akan terus melakukan upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, promosi investasi yang lebih terarah, optimalisasi fasilitasi pasca-izin, serta pemanfaatan data dan sistem informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan langkah tersebut, DPMPTSP diharapkan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi strategis di wilayah barat Indonesia yang memiliki karakteristik kepulauan dengan posisi geografis sangat berdekatan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Kondisi geografis tersebut menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan investasi, perdagangan, industri, dan jasa, khususnya yang berorientasi pada pasar internasional. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga didukung oleh keberadaan kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta infrastruktur pendukung yang terus berkembang.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi menjadi salah satu motor penggerak utama pembangunan daerah yang memerlukan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta fasilitasi penanaman modal di daerah. DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau bertugas untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan percepatan pelayanan kepada pelaku usaha, sekaligus mendorong peningkatan realisasi investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban amanat tersebut, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja yang optimal dan terukur. Kinerja tersebut harus selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan nasional di bidang penanaman modal dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pelaporan kinerja yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara komprehensif dan sistematis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

LAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan, antara lain Rencana

Strategis DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Kerja Tahunan, serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Analisis kinerja dalam LAKIP ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada periode sebelumnya.

Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada perubahan dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja tetap relevan dan selaras dengan perkembangan kebutuhan daerah dan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi, pengendalian, serta peningkatan kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

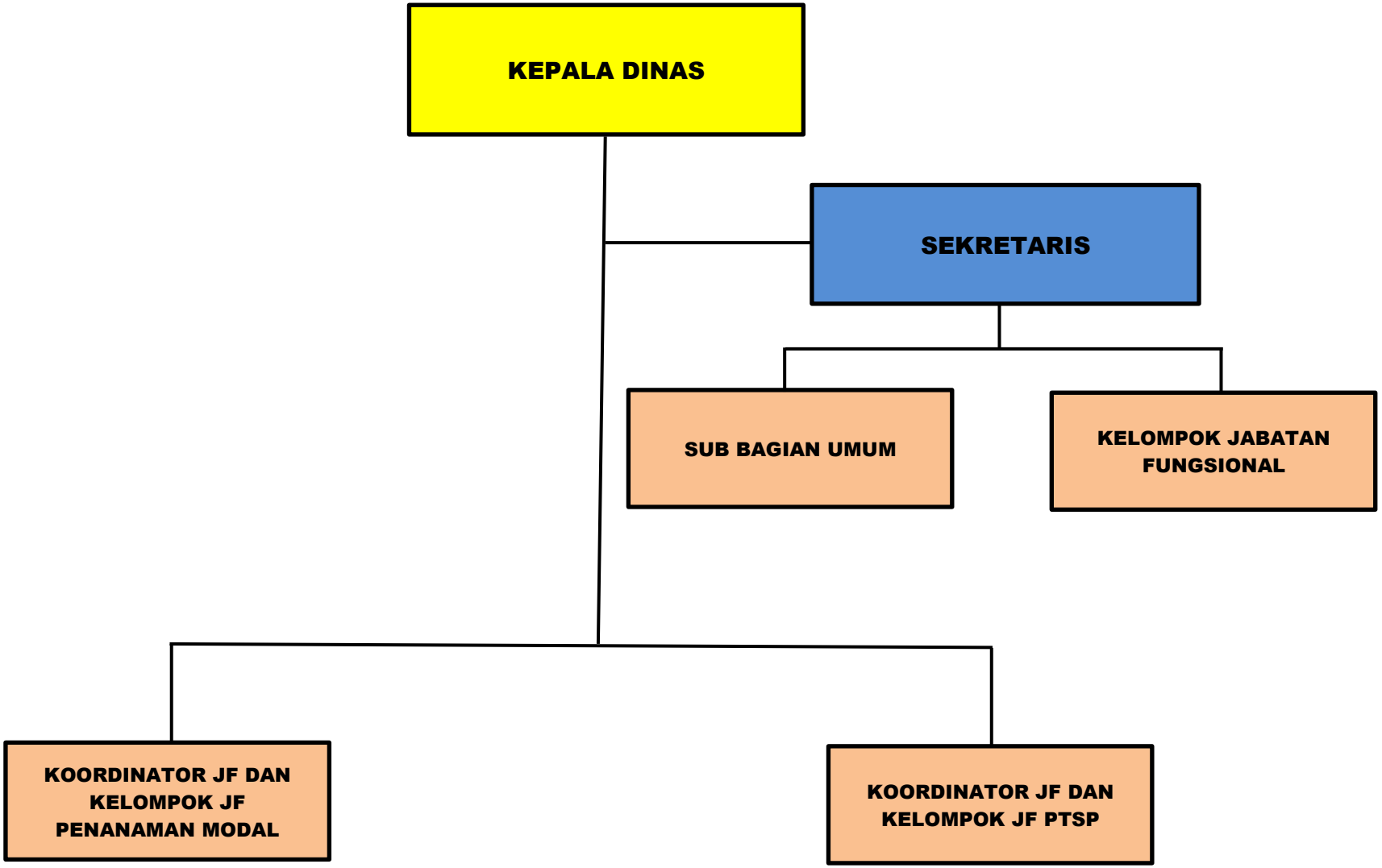
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan meliputi Perencanaan, Evaluasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
2. Penyusunan Program dan Pengendalian dibidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan non penanaman modal;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Promosi kepada calon penanam modal mengenai potensi daerah dan peluang-peluang investasi;
5. Pengkoordinasian perencanaan penanaman modal dan promosi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dan non penanaman modal;
7. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya;
8. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten/Kota;

9. Pelaksanaan monitoring terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan untuk peningkatan pelayanan;
10. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
11. Pelaksanaan monitoring terhadap penanaman modal untuk pembangunan daerah; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, disusunlah Sistem Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN PERGUB NOMOR 12 TAHUN 2023



C. Peran Strategis DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi kepulauan Riau menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029, antara lain:

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program
1	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

D. Perencanaan Startegis DPMPTSP Tahun 2025-2029

Penyusunan Perubahan Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan amanat pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan untuk menyiapkan rancangan Renstra K/L sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dengan periode lima tahun serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Pada sidang kabinet tanggal 27 Oktober 2014, Presiden mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) agar tidak menyusun visi dan misi sendiri melainkan menggunakan visi dan misi Presiden, begitupun OPD di daerah harus menyesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta memperhatikan tahapan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, strategi dan kebijakan jangka menengah nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Sejalan dengan kebijakan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015

tentang RUPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2025, diarahkan kebijakan Penanaman Modal pada fokus pengembangan penanaman modal pada pengembangan pangan, infrastruktur, pengembangan energi, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan dan ekonomi kreatif yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi informatika serta teknologi tepat guna. Semikian pula dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta perkoperasian melalui kemudahan pelayanan perizinan dan insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Rumusan strategi jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan misi kepala daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau masuk ke dalam misi ke-1 (satu) yaitu **"Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah"**. Pencapaian misi ini dilakukan dengan Program strategi sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal

Kebijakan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan strategi pencapaian masing-masing misi, sebagai berikut :

1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi ditingkat lokal, regional maupun nasional, dan perbaikan kualitas pelayanan perizinan.
2. Peningkatan kualitas kelembagaan, peningkatan daya saing SDM, peningkatan akses sumber daya produktif, pembiayaan dan nilai tambah pemasaran, koperasi dan UKM.

E. Tujuan DPMPTSP Tahun 2025

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau periode 2025-2029. Berdasarkan tugas dn fungsi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan promosi dan kerjasama peningkatan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mempermudah pelayanan penanaman modal.
3. Mewujudkan pengelolaan dan ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal.

F. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, terdiri dari 6 (enam) Program, 13 (Tiga belas) Kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Kompetensi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Program	:	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan	:	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Sub Kegiatan	:	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
Program	:	Promosi Promosi Penanaman Modal
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Program	:	Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan	:	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sub Kegiatan	:	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Kegiatan	:	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sub Kegiatan	:	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
Program	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pengawasan Penanaman Modal
Sub Kegiatan	:	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Sub Kegiatan	:	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
Program	:	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan	:	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan DPMPTSP

Rencana Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut yang mencakup periode dari rencana strategis yang telah disusun. Dalam proses rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Rencana Kinerja satu tahun anggaran disebut juga dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menjabarkan dan menetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasikan sasaran-sasaran yang ingin dicapai di tahun 2025. Untuk setiap sasaran strategis yang ada, diidentifikasikan indikator kinerja utama (IKU) yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari dokumen rencana strategis yang telah ada.

B. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir perencanaan strategis, didentifikasikan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

C. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah disepakati dapat terpenuhi dalam tahun 2025. Pada tahap ini juga didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

D. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja utama (IKU) baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau juga menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode Dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau akan dilaksanakan dengan enam (6) program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengeloaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

B. Perjanjian Kinerja DPMPTSP

Pada tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) Perjanjian Kinerja berdasarkan pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Miliar Rupiah	20.305
2	Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PTSP	Nilai	85,2
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	BB

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Miliar Rupiah	47.700

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang dilaporkan ke pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Capaian Kinerja suatu organisasi dapat diukur dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja dengan realisasi pada setiap periode. Dalam dokumen Lakip, capaian kinerja diukur setiap tahunnya untuk dapat menjadi gambaran terhadap pencapaian organisasi selama satu tahun, dan juga merupakan bahan evaluasi untuk pencapaian target pada tahun yang akan datang. Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, dapat digambarkan dalam tabel Skala interval sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Interval Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LAKIP Tahun 2025

Skor	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	*2*	*3*
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Baik
2	76 % ≤ 90 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	50 % ≤	Sangat Rendah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kategori
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Miliar Rupiah	20.305	64.675	318	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PTSP	Nilai	85,2	86,93	102,03	Sangat Baik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	BB	A	100	Sangat Baik

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Penjelasan capaian indikator kinerja utama untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Tingkat capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal” ditunjukkan dengan Indikator Kinerja yaitu Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Berdasarkan ke dua indikator diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sudah berhasil mencapai sasaran strategis 1 Tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kategori
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Miliar Rupiah	20.305	64.675	318	Sangat Baik

Penjelasan dari capaian masing-masing Indikator tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini :

A. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Realisasi nilai investasi di Provinsi Kepulauan Riau pada akhir Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang sangat signifikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Target realisasi investasi sebesar Rp20.305 miliar berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai Rp64.675 miliar pada akhir Triwulan IV Tahun 2025. Dengan capaian sebesar **318%** dari target, indikator kinerja ini berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan kinerja investasi daerah yang melampaui ekspektasi perencanaan awal.

Capaian realisasi investasi hingga akhir tahun ini menggambarkan konsistensi pertumbuhan investasi sepanjang Tahun 2025 yang terus menguat hingga Triwulan IV. Tren positif tersebut menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modal di Provinsi Kepulauan Riau tetap tinggi hingga akhir tahun anggaran, seiring dengan semakin stabilnya iklim usaha dan meningkatnya kepercayaan terhadap kepastian berusaha di daerah. Realisasi akhir tahun yang signifikan juga mengindikasikan adanya percepatan pelaksanaan proyek investasi yang masuk pada periode sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian realisasi investasi tersebut tidak terlepas dari peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan fasilitasi investasi. Berbagai upaya penyederhanaan perizinan, percepatan pelayanan, serta pendampingan kepada pelaku usaha turut berkontribusi dalam mendorong realisasi investasi hingga tahap implementasi di lapangan, khususnya pada proyek-proyek berskala besar.

Selain dari sisi nominal, realisasi investasi yang tinggi pada akhir Tahun 2025 juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Investasi yang terealisasi berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi, pengembangan sektor industri dan jasa, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal ini memperkuat peran investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.

Capaian realisasi investasi yang melampaui target ini juga mencerminkan efektivitas kebijakan dan strategi promosi penanaman modal yang telah dilaksanakan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan lainnya turut

mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, sehingga Provinsi Kepulauan Riau semakin diminati sebagai lokasi tujuan investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Secara keseluruhan, realisasi investasi sebesar Rp64.675 miliar pada akhir Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau di bidang penanaman modal. Capaian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan dan penetapan target investasi pada tahun-tahun berikutnya, guna menjaga kesinambungan pertumbuhan investasi dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

B. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian nilai realisasi investasi 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Bintan	6,115,230,740,000	3,453,412,675,000	3,035,173,940,000	12,224,094,439,071	18,227,343,835,527
Kabupaten Karimun	2,699,705,800,000	545,276,575,000	551,479,540,000	8,914,126,105,018	1,311,497,381,313
Kabupaten Kepulauan Anambas	65,472,000,000	19,552,310,000	186,089,800,000	28,910,503,471	81,202,227,923
Kabupaten Lingga	293,771,360,000.00	539,223,370,000	50,117,420,000.00	86,495,655,856	195,679,626,147
Kabupaten Natuna	44,020,400,000	21,986,550,000	117,097,140,000	63,212,116,588	40,069,162,952
Kota Batam	14,880,793,760,000	13,238,638,175,000	15,620,980,040,000	25,462,026,953,034	44,193,463,473,871
Kota Tanjung Pinang	907,499,940,000	402,827,100,000	603,934,640,000	482,959,713,905	626,279,468,150
Grand Total	**25,006,494,000,000**	**18,220,916,755,000**	**20,164,872,520,000**	**47,261,825,486,943**	**64,675,535,175,883**

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau mengalami tren pertumbuhan yang signifikan sepanjang periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, total realisasi investasi di Kepri tercatat Rp25,006 miliar, kemudian turun menjadi Rp18,220 miliar pada 2022 dan naik kembali pada 2023 menjadi Rp20,165 miliar. Lonjakan yang paling luar biasa terjadi pada 2024, ketika realisasi investasi mencapai Rp47,262 triliun, dan semakin meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp64,675 triliun. Data ini menunjukkan momentum pertumbuhan investasi yang semakin kuat di Kepri dari tahun ke tahun, terutama sejak 2024-2025.

Perbandingan tahunan memperlihatkan bahwa realisasi investasi tahun 2025 mencapai nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Realisasi Rp64,675 triliun pada 2025 lebih tinggi sekitar 37 persen dibanding 2024 dan bahkan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan realisasi 2021 Rp25,006 miliar. Kenaikan tersebut memperlihatkan peningkatan kepercayaan investor dan dinamika investasi yang terus berkembang di wilayah Kepri, terutama di kawasan-kawasan strategis seperti Batam, yang menjadi motor utama investasi di provinsi ini.

Kenaikan realisasi investasi selama 2025 juga sejalan dengan tren nasional. Secara agregat di tingkat nasional, realisasi investasi Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp1.714 triliun, tumbuh lebih dari 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan juga melampaui target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di daerah, termasuk di Kepulauan Riau, bergerak searah dengan iklim investasi nasional yang tetap kuat meskipun tantangan global masih berlangsung.

Salah satu kontributor utama dari capaian investasi provinsi ini adalah Kota Batam, yang pada tahun 2025 mencatat realisasi investasi riil sebesar sekitar Rp69,30 triliun, bahkan melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp60 triliun. Hal ini menunjukkan Batam tetap menjadi magnet investasi karena posisi strategisnya sebagai zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang menarik investor dari Singapura, Taiwan, Tiongkok, Malaysia dan negara-negara lainnya.

Selain itu, data historis menunjukkan bahwa pada periode 2021–2024, investasi di Kepri terus menunjukkan pergerakan yang positif meskipun pernah mengalami penurunan pada 2022. Realisasi investasi pada 2021–2023 telah menunjukkan bahwa Kepri sebagai kawasan penanaman modal memiliki daya tarik tersendiri, terutama dalam sektor industri, properti dan jasa yang memberikan kontribusi besar terhadap masuknya investasi PMA dan PMDN. Data tersebut juga mencatat tren peningkatan jumlah proyek investasi yang berdampak pada perluasan fasilitas industri dan peluang kerja di wilayah Kepri.

Kontribusi realisasi investasi 2025 yang mencapai Rp64,675 triliun juga berkaitan dengan perkembangan ekonomi Kepri secara keseluruhan. Laju pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat menonjol pada tahun 2025, dengan pertumbuhan yang bahkan menjadi salah satu tertinggi di Sumatera, tercatat sebesar 7,48 persen pada Triwulan III 2025. Pertumbuhan

ekonomi ini turut mendorong kepercayaan investor untuk memperluas kegiatan usahanya di provinsi ini.

Perbandingan antar tahun juga menunjukkan dinamika struktural investasi di wilayah tersebut. Realisasi investasi yang meningkat tajam pada 2024 dan 2025 tidak hanya mencerminkan pergerakan angka, tetapi juga mencerminkan perbaikan dalam pelayanan perizinan dan iklim usaha yang lebih kondusif. Hal ini tentu saja menjadi sinyal positif bagi para pelaku usaha dan investor bahwa Kepulauan Riau terus memperkuat daya saingnya di panggung investasi regional maupun nasional.

Secara keseluruhan, capaian realisasi investasi di Kepulauan Riau pada 2025 menunjukkan bahwa target investasi tidak hanya tercapai, tetapi jauh melampaui angka yang diharapkan dari tren perencanaan awal. Peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan stabilitas perkembangan investasi yang sehat dan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah serta menunjukkan efektivitas program fasilitasi dan promosi investasi oleh pemerintah daerah.

Dengan kinerja yang sangat kuat pada tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau dapat menempatkan dirinya sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan investasi tercepat di Indonesia, meskipun belum berada di puncak daftar nasional. Pertumbuhan ini menunjukkan perbaikan signifikan dan konsistensi dalam menarik modal investasi yang berkelanjutan, yang diharapkan semakin memperkuat peran investasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, capaian realisasi investasi pada tahun 2025 merupakan bukti bahwa strategi pembangunan dan kebijakan investasi yang diterapkan di Kepulauan Riau mampu menarik investor dan mendorong realisasi proyek-proyek investasi secara efektif, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra

Capaian nilai realisasi investasi PMA dan PMDN merupakan indikator kinerja dari sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal. Persentase capaian kinerja Nilai Investasi PMA dan PMDN Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra

Capaian Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD/Renstra	Persentase terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra
64.675 Miliar	124.298 Miliar	52,03 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Berdasarkan perbandingan antara capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dengan target akhir RPJMD/Renstra Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026, dapat diketahui bahwa realisasi investasi yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) telah mencapai nilai sebesar 64,675 miliar rupiah. Sementara itu, target akhir yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah sebesar 124,298 miliar rupiah. Dengan demikian, capaian kinerja hingga tahun 2025 berada pada angka 52,03 persen terhadap target akhir RPJMD/Renstra.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara kumulatif, hingga tahun kelima pelaksanaan RPJMD/Renstra, realisasi investasi telah melampaui setengah dari target yang ditetapkan untuk periode enam tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan realisasi penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui kebijakan dan program yang mendukung iklim investasi, telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Capaian ini juga mencerminkan daya tarik Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah strategis tujuan investasi di tingkat nasional.

Perlu dicermati bahwa periode RPJMD/Renstra Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 disusun untuk jangka waktu enam tahun, berbeda dengan pola umum perencanaan yang lazimnya berdurasi lima tahun. Pembagian target dalam enam tahun tersebut berimplikasi pada distribusi capaian yang tidak selalu bersifat linier setiap tahunnya. Oleh karena itu, capaian sebesar 52,03 persen hingga tahun 2025 dapat dinilai relatif sejalan

dengan tahapan waktu pelaksanaan Renstra/RPJMD yang masih menyisakan satu tahun pelaksanaan pada tahun 2026.

Dari perspektif kinerja sasaran strategis, capaian realisasi investasi tahun 2025 ini menunjukkan bahwa arah kebijakan peningkatan penanaman modal telah berjalan sesuai dengan koridor perencanaan yang ditetapkan. Meski demikian, masih terdapat selisih capaian sebesar 47,97 persen yang perlu dikejar agar target akhir RPJMD/Renstra dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini menuntut adanya penguatan strategi dan akselerasi realisasi investasi pada sisa periode perencanaan.

Kondisi tersebut sekaligus menggambarkan tantangan yang harus dihadapi pada tahun terakhir RPJMD/Renstra, yaitu memastikan agar potensi investasi yang telah terbangun, baik melalui promosi, kemudahan perizinan, maupun peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, dapat terealisasi secara konkret dalam bentuk nilai investasi. Fokus kebijakan perlu diarahkan pada sektor-sektor unggulan dan proyek strategis yang memiliki potensi realisasi tinggi dalam jangka pendek.

Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi investasi tahun 2025 dengan target akhir RPJMD/Renstra Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik dan berada pada jalur yang positif. Capaian lebih dari separuh target akhir ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pada tahun 2026, sehingga sasaran strategis meningkatnya realisasi penanaman modal dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Selain memiliki target daerah yang tercantum dalam Dokumen Renstra DPMPTSP dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, pengukuran kinerja capaian nilai realisasi investasi juga berdasarkan target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM. Capaian kinerja indikator Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berdasarkan target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Tahun 2025 dengan Target Nasional

Capaian Realisasi 2025	Target Nasional	Kinerja
64.675 Miliar	57.890 Miliar	111,71 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 tercatat sebesar 64,675 miliar rupiah, sementara target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 57,890 miliar rupiah. Dengan demikian, kinerja realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau mencapai 111,71 persen dari target nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya mampu memenuhi target yang diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi juga berhasil melampauinya secara signifikan.

Secara nasional, realisasi investasi Indonesia tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan siaran pers Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi nasional sepanjang tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan, didorong oleh peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan, hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan investasi domestik. Kondisi ini menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan dampak positif bagi daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Riau, dalam mendorong realisasi penanaman modal.

Capaian realisasi investasi Kepulauan Riau yang melampaui target nasional juga mencerminkan posisi strategis provinsi ini dalam peta investasi nasional. Keunggulan geografis yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, keberadaan kawasan industri dan kawasan perdagangan bebas, serta dukungan infrastruktur yang relatif memadai menjadi faktor penarik utama bagi investor. Hal ini sejalan dengan data BKPM yang menunjukkan bahwa Kepulauan Riau secara konsisten menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi investasi yang cukup besar di wilayah Sumatera.

Selain itu, keberhasilan ini juga tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang penanaman modal. Sinkronisasi program daerah dengan arah kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, khususnya dalam percepatan perizinan berusaha, promosi investasi, serta fasilitasi investor, turut mendorong tingginya realisasi investasi di Kepulauan Riau. Kinerja ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional dapat diimplementasikan seara efektif di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 yang mencapai 111,71 persen terhadap target nasional menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan kontribusi nyata daerah terhadap pencapaian target investasi nasional. Capaian ini dapat menjadi dasar evaluasi positif serta pijakan strategis bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja investasi pada tahun-tahun berikutnya, sejalan dengan arah pembangunan dan kebijakan penanaman modal nasional.

E. Informasi/Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 yang mampu melampaui target nasional dan menunjukkan tren positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tidak terlepas dari kombinasi faktor kebijakan, kondisi wilayah, serta peran aktif perangkat daerah terkait, khususnya DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum, peningkatan kinerja investasi mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Faktor-faktor utama yang mendorong keberhasilan capaian investasi antara lain:

- Posisi strategis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, sehingga menjadi pintu gerbang investasi asing dan kawasan logistik regional.
- Keberadaan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan perdagangan bebas seperti Batam, Bintan, dan Karimun yang memberikan daya tarik tinggi bagi investor.
- Dukungan kebijakan nasional, khususnya kebijakan hilirisasi dan kemudahan berusaha yang dicanangkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- Stabilitas ekonomi daerah serta ketersediaan infrastruktur dasar yang relatif memadai untuk mendukung kegiatan investasi.
- Meningkatnya minat investor pada sektor industri pengolahan, jasa, logistik, dan pariwisata yang menjadi sektor unggulan di Kepulauan Riau.

Dalam mendukung keberhasilan tersebut, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berperan aktif melalui berbagai upaya strategis, antara lain:

- Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepastian hukum bagi investor.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal melalui penyederhanaan prosedur, transparansi informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.
- Pelaksanaan promosi investasi daerah secara berkelanjutan, baik melalui forum investasi, pameran, maupun kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pelaku usaha.
- Fasilitasi dan pendampingan investor sejak tahap perencanaan hingga realisasi investasi, termasuk penyelesaian kendala perizinan dan nonperizinan.
- Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi vertikal guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan investasi.

Selain faktor keberhasilan, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan berbagai alternatif solusi untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi hambatan dalam pencapaian investasi, antara lain:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi investasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan investasi.
- Meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan strategis nasional di bidang penanaman modal.
- Mendorong perbaikan iklim investasi melalui pemberian informasi peluang investasi yang akurat dan berbasis potensi daerah.
- Mengoptimalkan pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan program.

Secara keseluruhan, keberhasilan capaian investasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 merupakan hasil dari sinergi antara kebijakan nasional, keunggulan daerah, serta upaya terstruktur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Upaya-

upaya tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan dan peningkatan kinerja investasi pada tahun-tahun mendatang.

F. Informasi/Analisis Upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka menjaga kesinambungan serta meningkatkan kinerja penanaman modal pada tahun-tahun selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui DPMPTSP perlu melakukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Upaya perbaikan ini diarahkan untuk menjawab tantangan yang masih dihadapi, sekaligus mengoptimalkan potensi daerah agar capaian investasi tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.

Upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan ke depan antara lain:

- Penguatan kualitas pelayanan perizinan berusaha melalui peningkatan keandalan layanan OSS berbasis risiko, termasuk pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan perizinan.
- Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, agar mampu memberikan pelayanan yang responsif, akurat, dan berorientasi pada kepuasan investor.
- Penguatan promosi investasi yang lebih terarah dan berbasis potensi unggulan daerah, dengan menyusun profil peluang investasi yang spesifik per sektor dan wilayah.
- Optimalisasi fasilitasi pasca-izin melalui pemantauan realisasi investasi dan penyelesaian hambatan yang dihadapi investor selama tahap konstruksi maupun operasional.
- Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, dan kepastian regulasi.

Selain itu, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau juga akan mendorong perbaikan dari sisi tata kelola dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program penanaman modal dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika ekonomi.

Upaya pendukung lainnya yang akan dilakukan meliputi:

- Penguatan sistem informasi penanaman modal untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, serta kemudahan akses informasi bagi investor dan pemangku kepentingan.
- Peningkatan peran daerah dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya terkait hilirisasi industri, pengembangan kawasan strategis, dan investasi berkelanjutan.
- Mendorong kemitraan antara investor besar dengan pelaku usaha lokal dan UMKM guna meningkatkan dampak investasi terhadap perekonomian daerah.
- Penguatan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan program penanaman modal di masa mendatang.

Upaya perbaikan kinerja ke depan diharapkan mampu memperkuat daya saing investasi Provinsi Kepulauan Riau, menjaga kepercayaan investor, serta mendorong realisasi investasi yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan arah pembangunan daerah dan kebijakan penanaman modal nasional.

G. Informasi/Analisis tentang Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan

Dalam upaya pencapaian indikator capaian realisasi investasi tahun 2025, DPMPTSP melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun program yang mendukung pencapaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Program yang mendukung Indikator Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Program	Pagu (Rp)	Realisasi	(%)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	219.614.350	202.641.291	92.27
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	348.266.180	343.536.124	98.64
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	51.106.895	48,201,398	94.31
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	13.707.100	13.517.645	98.62

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

H. Informasi/Analisis atas efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pencapaian kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta pemanfaatan sistem dan teknologi informasi. Sepanjang tahun 2025, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berupaya memastikan bahwa seluruh sumber daya tersebut digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dari sisi sumber daya manusia, efektivitas ditunjukkan melalui penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan tugas yang diemban, khususnya pada unit-unit pelayanan perizinan dan penanaman modal. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pembaruan pemahaman terhadap regulasi penanaman modal dan sistem OSS berbasis risiko. Dengan jumlah aparatur yang relatif terbatas, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mampu tetap memberikan layanan yang responsif dan tepat waktu, sehingga mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan tenaga kerja.

Efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari capaian realisasi program dan kegiatan yang relatif tinggi serta selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan realisasi investasi, seperti pengelolaan sistem informasi, promosi penanaman modal, dan fasilitasi investor. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis DPMPTSP.

Dari aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan fasilitas kerja dilakukan secara optimal dengan menyesuaikan kebutuhan pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang ada. Pemanfaatan ruang kerja, peralatan perkantoran, serta infrastruktur teknologi informasi diarahkan untuk mendukung kelancaran proses pelayanan tanpa menimbulkan pemborosan. Penggunaan sistem perizinan elektronik dan komunikasi digital juga mengurangi ketergantungan pada proses manual, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Integrasi layanan melalui OSS serta penggunaan sistem pendukung pengelolaan data penanaman modal memungkinkan proses pelayanan dan pelaporan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja internal organisasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses layanan perizinan.

Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tercermin dari kemampuan organisasi dalam

mencapai target kinerja dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan sumber daya yang terarah, berbasis prioritas, dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta pencapaian realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP

Tingkat capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP" ditunjukkan dengan Indikator Kinerja yaitu Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PTSP. Berdasarkan indikator diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sudah berhasil mencapai sasaran strategis 2 Tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kategori
2	Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PTSP	Nilai	85,2	86,93	102,03	Sangat Baik

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Penjelasan dari capaian masing-masing Indikator tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini :

A. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan PTSP yang diukur melalui Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Target yang ditetapkan sebesar 85,2 dan realisasi yang dicapai sebesar 86,93. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan PTSP telah melampaui target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,03 persen dan dikategorikan sangat baik. Hasil ini merefleksikan keberhasilan DPMPTSP dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan publik secara konsisten sepanjang tahun 2025.

Capaian nilai SKM tersebut menggambarkan persepsi positif masyarakat terhadap layanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan. Realisasi yang melampaui target

menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan, baik dari sisi prosedur, kecepatan, maupun sikap petugas, telah dirasakan secara nyata oleh pengguna layanan. Dengan demikian, indikator ini menjadi salah satu bukti akuntabilitas kinerja DPMPTSP dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berdasarkan dokumen SKM Tahun 2025, survei dilaksanakan terhadap 65 responden yang merupakan pengguna layanan PTSP pada periode Januari sampai dengan Juni 2025. Responden didominasi oleh pelaku usaha yang mengurus perizinan secara mandiri, sehingga penilaian yang diberikan mencerminkan pengalaman langsung masyarakat tanpa perantara. Hal ini memperkuat validitas hasil survei sebagai gambaran objektif kualitas layanan PTSP.

Dari sisi karakteristik responden, mayoritas responden berada pada usia produktif dan memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengguna layanan PTSP merupakan kelompok yang relatif kritis terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, nilai kepuasan yang tinggi mengindikasikan bahwa layanan PTSP mampu memenuhi ekspektasi masyarakat yang cukup beragam dari sisi latar belakang dan kebutuhan.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan nilai rata-rata indeks sebesar 3,48 yang berada pada kategori mutu pelayanan baik. Setelah dikonversi sesuai ketentuan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, nilai tersebut berada pada rentang kinerja baik menuju sangat baik. Capaian ini selaras dengan realisasi indikator kinerja pada tabel sasaran strategis yang menunjukkan kategori sangat baik.

Jika ditinjau per unsur pelayanan, sebagian besar unsur memperoleh penilaian sangat baik, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur, waktu pelayanan, produk layanan, dan perilaku pelaksana. Nilai yang tinggi pada unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa proses pelayanan PTSP telah berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perizinan.

Unsur kompetensi pelaksana juga memperoleh penilaian baik, yang mencerminkan bahwa petugas PTSP dinilai memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam memberikan pelayanan. Hal ini tidak terlepas dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan penyesuaian terhadap kebijakan perizinan berbasis risiko yang terus berkembang.

Pada unsur sarana dan prasarana serta layanan berbasis internet, nilai yang diperoleh berada pada kategori baik namun relatif lebih rendah dibanding unsur lainnya. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan, khususnya dalam peningkatan kenyamanan fasilitas pelayanan dan optimalisasi sistem pelayanan daring agar lebih mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penilaian terhadap penanganan pengaduan, saran, dan masukan juga berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan telah berjalan, namun masih perlu diperkuat agar tindak lanjut pengaduan dapat dilakukan lebih cepat dan transparan. Penguatan aspek ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Aspek integritas petugas pelayanan memperoleh penilaian yang sangat positif, dengan mayoritas responden menyatakan integritas petugas berada pada kategori sangat baik. Temuan ini menunjukkan bahwa pelayanan PTSP relatif bebas dari praktik tidak sesuai ketentuan dan dilaksanakan secara profesional. Integritas petugas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil SKM Tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas layanan PTSP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berada pada tingkat yang baik dan cenderung sangat baik. Capaian realisasi nilai SKM yang melampaui target memperlihatkan bahwa strategi peningkatan kualitas pelayanan telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pengguna layanan.

Dengan capaian tersebut, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau memiliki modal yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di tahun-tahun berikutnya. Hasil SKM ini tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan berkelanjutan, khususnya pada unsur-unsur pelayanan yang masih berada pada kategori baik agar dapat ditingkatkan menjadi sangat baik secara menyeluruh.

B. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Capaian Nilai Hasil SKM terhadap layanan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian nilai 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

TAHUN				
2021	2022	2023	2024	2025
81,51	85,86	85,58	87,09	86,93

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Perbandingan capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan PTSP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Nilai SKM pada tahun 2021 tercatat sebesar 81,51 yang berada pada kategori baik, mencerminkan bahwa pada periode tersebut pelayanan PTSP telah memenuhi standar dasar pelayanan publik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa unsur pelayanan.

Pada tahun 2022, nilai SKM meningkat cukup signifikan menjadi 85,86. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan PTSP, baik dari sisi prosedur, kejelasan persyaratan, maupun sikap petugas pelayanan. Peningkatan tersebut juga mengindikasikan mulai efektifnya berbagai upaya pembenahan pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP dalam merespons kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.

Memasuki tahun 2023, nilai SKM sedikit menurun menjadi 85,58. Meskipun terjadi penurunan tipis dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini tetap berada pada kategori baik dan relatif stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PTSP secara umum dapat dipertahankan, meskipun terdapat dinamika dalam pelaksanaan pelayanan yang mempengaruhi persepsi sebagian pengguna layanan.

Pada tahun 2024, nilai SKM kembali mengalami peningkatan menjadi 87,09 dan mendekati kategori sangat baik. Capaian ini mencerminkan keberhasilan DPMPTSP dalam melakukan penyesuaian dan penguatan kualitas pelayanan, termasuk adaptasi terhadap sistem pelayanan berbasis elektronik dan peningkatan koordinasi antarunit pelayanan. Peningkatan ini juga menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PTSP.

Tahun 2025 mencatat nilai SKM sebesar 86,93, yang meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024, tetap menunjukkan kinerja pelayanan yang konsisten pada kategori baik menuju sangat baik. Stabilitas nilai ini menggambarkan bahwa kualitas

pelayanan PTSP mampu dipertahankan secara berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada tantangan operasional dan meningkatnya ekspektasi masyarakat.

Jika ditinjau secara keseluruhan, tren nilai SKM selama periode 2021–2025 menunjukkan pola peningkatan jangka panjang dengan fluktuasi yang relatif kecil. Kenaikan nilai dari 81,51 pada tahun 2021 menjadi 86,93 pada tahun 2025 mencerminkan adanya perbaikan sistematis dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan PTSP oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.

Fluktuasi nilai SKM antar tahun dapat dipahami sebagai dampak dari dinamika kebijakan pelayanan, perubahan sistem perizinan, serta adaptasi terhadap teknologi dan regulasi baru. Meskipun demikian, fluktuasi tersebut tidak mengubah posisi umum kualitas pelayanan yang tetap berada pada kategori baik dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Secara analitis, perbandingan capaian SKM tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa sasaran strategis peningkatan kualitas layanan PTSP telah dicapai secara bertahap dan konsisten. Hasil ini menegaskan bahwa DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah berada pada jalur yang tepat dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih optimal pada periode perencanaan berikutnya.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra

Capaian nilai Hasil Survey SKM terhadap layanan PTSP merupakan indikator kinerja dari sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP. Persentase capaian kinerja Nilai SKM Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra

Capaian Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD/Renstra	Persentase terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra
86,93	86,10	100,96

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Perbandingan capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan PTSP antara realisasi Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD/Renstra menunjukkan hasil yang sangat positif. Berdasarkan data yang tersedia, capaian realisasi nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 tercatat sebesar 86,93, sementara target akhir RPJMD/Renstra ditetapkan sebesar 86,10. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan PTSP telah melampaui target perencanaan yang ditetapkan.

Pencapaian nilai realisasi yang lebih tinggi dibandingkan target akhir RPJMD/Renstra mencerminkan keberhasilan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dalam mengimplementasikan kebijakan dan program peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten. Selisih capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan telah berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat pengguna layanan.

Persentase capaian terhadap target akhir RPJMD/Renstra yang mencapai 100,96 persen mengindikasikan bahwa sasaran strategis telah tercapai secara optimal. Capaian di atas 100 persen ini menjadi indikator bahwa kualitas layanan PTSP tidak hanya memenuhi standar minimal yang ditetapkan, tetapi juga telah memberikan nilai tambah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil ini juga mencerminkan adanya keselarasan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan program di lapangan. Target yang ditetapkan dalam RPJMD/Renstra telah disusun secara realistis dan terukur, sementara pelaksanaan kebijakan oleh DPMPTSP mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai bahkan melampaui target tersebut.

Dari perspektif akuntabilitas kinerja, capaian ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan prinsip perencanaan berbasis kinerja dengan baik. Indikator kualitas layanan PTSP yang diukur melalui SKM menjadi alat evaluasi yang objektif dan terukur dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian sasaran strategis ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan PTSP. Nilai kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasakan perbaikan pada aspek-aspek penting pelayanan, seperti kejelasan

prosedur, ketepatan waktu, kompetensi petugas, serta kemudahan akses layanan perizinan dan nonperizinan.

Meskipun target akhir RPJMD/Renstra telah terlampaui, hasil ini tetap perlu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat menuntut DPMPTSP untuk tidak berhenti pada capaian yang ada, tetapi terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan.

Selain itu, capaian Tahun 2025 ini dapat menjadi pijakan yang kuat dalam penyusunan perencanaan periode berikutnya. Evaluasi atas keberhasilan pencapaian target RPJMD/Renstra perlu diintegrasikan dalam penyusunan indikator dan target baru agar kualitas layanan PTSP dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan.

Secara keseluruhan, perbandingan antara capaian realisasi Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD/Renstra menunjukkan bahwa sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan PTSP telah tercapai dengan sangat baik. Capaian ini menegaskan komitmen DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

D. Informasi/Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan peningkatan kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 tidak terlepas dari konsistensi penerapan kebijakan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta penguatan tata kelola pelayanan perizinan dan nonperizinan. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama, khususnya nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berhasil melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna layanan.

Peningkatan kinerja juga dipengaruhi oleh semakin optimalnya pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, yang didukung oleh peran aktif DPMPTSP sebagai fasilitator dan pendamping bagi pelaku usaha. Meskipun sistem OSS dikelola secara nasional, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mampu beradaptasi dengan

memberikan layanan konsultasi, asistensi, dan penyelesaian kendala perizinan secara responsif, sehingga proses pelayanan tetap berjalan efektif.

Selain itu, komitmen pimpinan dan aparatur dalam menjaga integritas serta profesionalisme pelayanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hasil SKM menunjukkan bahwa aspek perilaku dan integritas petugas memperoleh penilaian tinggi, yang menandakan bahwa budaya pelayanan prima telah mulai terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini turut mendorong terciptanya iklim pelayanan yang kondusif dan berorientasi pada kepentingan pengguna layanan.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan kinerja dan mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau juga telah melaksanakan sejumlah alternatif solusi sebagai langkah perbaikan berkelanjutan. Solusi tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas sarana prasarana, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyempurnaan mekanisme layanan dan pengaduan masyarakat.

Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja:

- Adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran DPMPTSP dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
- Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) yang didukung oleh layanan pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha.
- Penerapan standar pelayanan yang jelas dan konsisten, sehingga memberikan kepastian prosedur, waktu, dan persyaratan pelayanan.
- Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan melalui pembinaan dan penyesuaian terhadap regulasi serta sistem perizinan terbaru.
- Terjaganya integritas dan perilaku petugas pelayanan yang berorientasi pada pelayanan prima dan kepuasan masyarakat.
- Optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah teknis dan instansi terkait dalam penyelesaian perizinan dan nonperizinan.

Alternatif Solusi / Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan:

- Peningkatan layanan konsultasi dan asistensi perizinan, baik secara langsung maupun melalui media daring, untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha memahami proses perizinan.
- Perbaikan dan penyesuaian sarana dan prasarana pelayanan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan PTSP.
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan pelayanan prima bagi petugas PTSP.
- Penyempurnaan mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat agar lebih mudah diakses dan cepat ditindaklanjuti.
- Peningkatan koordinasi internal dan eksternal guna mempercepat penyelesaian kendala perizinan yang bersifat lintas sektor.
- Evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan melalui pemanfaatan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

E. Informasi/Analisis Upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan kinerja ke depan pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja yang telah dicapai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan PTSP secara lebih optimal. Meskipun capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan sebagian indikator telah melampaui target, dinamika regulasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat menuntut adanya langkah perbaikan yang terencana dan berkesinambungan.

Perbaikan kinerja ke depan difokuskan pada penguatan aspek pelayanan publik yang masih memerlukan peningkatan, khususnya pada sarana dan prasarana pelayanan, optimalisasi layanan berbasis elektronik, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pelayanan, mempercepat penyelesaian perizinan, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau juga akan memperkuat fungsi koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah teknis serta instansi terkait lainnya. Penguatan koordinasi ini menjadi penting mengingat kompleksitas perizinan berusaha yang bersifat lintas sektor, sehingga penyelesaian perizinan dapat dilakukan secara terpadu dan tidak menimbulkan hambatan administratif yang berlarut-larut.

Dalam rangka mendukung perbaikan kinerja yang berkelanjutan, hasil evaluasi kinerja dan Survei Kepuasan Masyarakat akan terus dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program kerja. Dengan demikian, perbaikan kinerja tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan yang muncul, tetapi juga bersifat preventif dan antisipatif terhadap tantangan pelayanan di masa mendatang.

Analisis Arah dan Fokus Upaya Perbaikan Kinerja ke Depan:

- Peningkatan kualitas pelayanan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin menuntut layanan yang cepat, mudah, dan transparan.
- Upaya perbaikan perlu difokuskan pada unsur pelayanan yang masih berada pada kategori baik agar dapat ditingkatkan menjadi sangat baik secara merata.
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- Penguatan sumber daya manusia merupakan faktor strategis dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan di tengah perubahan regulasi dan sistem perizinan.

Upaya Perbaikan Kinerja ke Depan:

- Melakukan peningkatan dan penataan sarana prasarana pelayanan PTSP agar lebih representatif, nyaman, dan mendukung citra pelayanan publik yang profesional.
- Mengoptimalkan layanan perizinan berbasis elektronik, termasuk peningkatan kualitas pendampingan penggunaan OSS-RBA bagi pelaku usaha.
- Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis, bimbingan pelayanan prima, serta penguatan pemahaman terhadap regulasi penanaman modal.
- Memperkuat sistem penanganan pengaduan masyarakat agar lebih responsif, terintegrasi, dan memiliki tindak lanjut yang terukur.

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah teknis dan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan.
- Melaksanakan evaluasi kinerja dan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai dasar perbaikan layanan yang berkelanjutan.

F. Informasi/Analisis tentang Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan

Dalam upaya pencapaian indikator Nilai Hasil SKM tahun 2025, DPMPTSP melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun program yang mendukung pencapaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Program yang mendukung Indikator Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Program	Pagu (Rp)	Realisasi	(%)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	348.266.180	343.536.124	98,64

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Program Pelayanan Penanaman Modal merupakan salah satu program utama DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang secara langsung mendukung indikator meningkatnya kualitas layanan PTSP Tahun 2025. Program ini dirancang untuk memastikan terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pelaku usaha.

Berdasarkan data Tahun 2025, Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki pagu anggaran sebesar Rp348.266.180 dengan realisasi anggaran sebesar Rp343.536.124 atau mencapai 98,64 persen. Tingkat realisasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan optimal dan sebagian besar anggaran dapat dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Capaian realisasi anggaran tersebut mencerminkan adanya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan. DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mampu mengalokasikan anggaran program secara tepat sasaran untuk mendukung peningkatan kualitas layanan PTSP, tanpa terjadi pemborosan anggaran yang signifikan.

Tingginya realisasi anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal juga berkorelasi positif dengan capaian kinerja indikator kualitas layanan PTSP. Pelaksanaan kegiatan dalam program ini berkontribusi terhadap peningkatan kejelasan prosedur pelayanan, kemudahan akses layanan, serta peningkatan kualitas interaksi antara petugas pelayanan dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Dari sisi akuntabilitas kinerja, capaian realisasi anggaran sebesar 98,64 persen menunjukkan bahwa perencanaan program telah disusun secara realistis dan selaras dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan. Hal ini menandakan bahwa program pendukung indikator kinerja tidak hanya direncanakan dengan baik, tetapi juga dieksekusi secara konsisten sepanjang tahun berjalan.

Selain itu, Program Pelayanan Penanaman Modal berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dan peningkatan layanan konsultasi serta fasilitasi perizinan. Dukungan program ini memungkinkan DPMPTSP untuk memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha, sehingga berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan PTSP.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2025 telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator meningkatnya kualitas layanan PTSP. Dengan realisasi anggaran yang tinggi dan pemanfaatan yang efektif, program ini menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan.

G. Informasi/Analisis atas efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi guna mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas layanan PTSP. Seluruh sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana, diarahkan secara terencana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja utama.

Dari aspek sumber daya anggaran, efektivitas penggunaan anggaran tercermin dari tingginya tingkat realisasi pada program-program pendukung pelayanan penanaman modal

dan PTSP. Realisasi anggaran yang mendekati pagu menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan kegiatan di lapangan tanpa menimbulkan pemborosan yang signifikan.

Efisiensi penggunaan anggaran juga terlihat dari kemampuan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai target kinerja dengan proporsi anggaran yang relatif terbatas. Capaian indikator kualitas layanan PTSP yang melampaui target menunjukkan bahwa output dan outcome yang dihasilkan sebanding bahkan lebih besar dibandingkan dengan input sumber daya yang digunakan.

Pada aspek sumber daya manusia, efektivitas pemanfaatan aparatur ditunjukkan melalui optimalisasi peran dan fungsi pegawai sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya. Penugasan pegawai pada layanan PTSP dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan pelayanan, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lancar dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Efisiensi sumber daya manusia juga tercermin dari kemampuan aparatur dalam mengelola beban kerja pelayanan perizinan dan nonperizinan secara proporsional. Dengan dukungan sistem pelayanan berbasis elektronik, aparatur dapat melayani masyarakat dengan lebih cepat dan akurat tanpa harus menambah jumlah pegawai secara signifikan.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik, termasuk pemanfaatan OSS-RBA, membantu mempercepat proses pelayanan, mengurangi tatap muka langsung, serta meminimalkan penggunaan waktu dan biaya baik bagi aparatur maupun masyarakat pengguna layanan.

Dari sisi sarana dan prasarana, penggunaan fasilitas pelayanan dilakukan secara optimal untuk mendukung kelancaran proses PTSP. Meskipun masih terdapat keterbatasan pada beberapa aspek fasilitas fisik, pemanfaatan ruang kerja, peralatan, dan infrastruktur pendukung dilakukan secara efisien agar tetap mampu menunjang kualitas pelayanan yang diberikan.

Efektivitas penggunaan sumber daya juga tercermin dari terjaganya koordinasi dan sinergi antarunit kerja serta dengan perangkat daerah teknis terkait. Koordinasi yang baik

memungkinkan penyelesaian perizinan lintas sektor dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi, sehingga mengurangi potensi duplikasi pekerjaan dan pemborosan sumber daya.

Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan menunjukkan adanya penggunaan sumber daya yang berbasis pada data dan kebutuhan nyata. Pendekatan ini memastikan bahwa alokasi sumber daya difokuskan pada aspek pelayanan yang benar-benar memerlukan peningkatan.

Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 telah mendukung pencapaian kinerja pelayanan yang optimal. Dengan perencanaan yang matang, pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran yang tepat, DPMPTSP mampu menghasilkan kinerja pelayanan PTSP yang berkualitas dan berkelanjutan.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP

Tingkat capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP” ditunjukkan dengan Indikator Kinerja yaitu SAKIP DPMPTSP. Berdasarkan indikator diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sudah berhasil mencapai sasaran strategis 3 Tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.12 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kategori
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	BB	A	100	Sangat Baik

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Penjelasan dari capaian masing-masing Indikator tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini :

A. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu sasaran strategis DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang secara konsisten diupayakan melalui penguatan sistem

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Pada Tahun 2025, capaian indikator Nilai SAKIP DPMPTSP menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu memperoleh nilai A, melampaui target yang ditetapkan sebesar BB. Capaian ini mencerminkan keberhasilan DPMPTSP dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara komprehensif dan berkelanjutan.

Perolehan nilai SAKIP kategori A menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah mampu menyelenggarakan manajemen kinerja yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Seluruh proses tersebut dilaksanakan secara sistematis dan selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kualitas perencanaan kinerja yang semakin baik, di mana sasaran, indikator, dan target kinerja disusun secara terukur dan relevan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Penyusunan dokumen perencanaan telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan nasional di bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada tahap pelaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan diarahkan untuk mendukung pencapaian hasil yang jelas dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Dari sisi pengukuran kinerja, DPMPTSP telah menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala. Pengukuran kinerja dilakukan secara objektif dan berbasis data, sehingga capaian kinerja dapat diketahui secara tepat dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial.

Pelaporan kinerja juga menunjukkan kualitas yang semakin baik, ditandai dengan penyusunan laporan kinerja yang informatif, akurat, dan tepat waktu. Laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang masih memerlukan perbaikan.

Selain itu, hasil evaluasi SAKIP telah dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi yang diberikan dalam evaluasi sebelumnya ditindaklanjuti secara sistematis, sehingga terjadi peningkatan kualitas manajemen kinerja dari tahun ke tahun.

Capaian nilai A pada SAKIP juga mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran DPMPTSP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan budaya kerja berbasis kinerja, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Peningkatan akuntabilitas kinerja turut berdampak pada meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Dengan sistem akuntabilitas yang baik, kinerja organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan instansi pembina.

Dari perspektif efektivitas organisasi, capaian ini menunjukkan bahwa DPMPTSP telah mampu mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output dan outcome yang sejalan dengan sasaran strategis. Hal ini memperkuat posisi DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, keberhasilan mencapai nilai SAKIP kategori A pada Tahun 2025 menegaskan bahwa DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah berada pada jalur yang tepat dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Capaian ini menjadi modal penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola kinerja di masa mendatang secara berkelanjutan.

B. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Capaian Nilai Hasil SKM terhadap layanan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian nilai 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

TAHUN				
2021	2022	2023	2024	2025
BB	BB	BB	BB	A

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Perbandingan capaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2025 menunjukkan adanya konsistensi kinerja yang baik dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2024, nilai SAKIP DPMPTSP

berada pada kategori BB, yang mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah diterapkan dengan cukup baik dan memenuhi sebagian besar kriteria penilaian.

Capaian nilai BB secara berkelanjutan pada tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki fondasi manajemen kinerja yang relatif stabil. Perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja telah berjalan sesuai dengan ketentuan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas dan penyempurnaan pada beberapa aspek manajemen kinerja.

Pada periode tersebut, DPMPTSP secara konsisten melakukan perbaikan terhadap sistem perencanaan dan pengukuran kinerja. Penyelarasan antara dokumen perencanaan, indikator kinerja, serta program dan kegiatan terus diupayakan agar kinerja organisasi lebih terarah dan terukur. Upaya ini menjadi dasar penting dalam menjaga konsistensi capaian nilai SAKIP.

Peningkatan kualitas pelaporan kinerja juga menjadi fokus perbaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan kinerja disusun dengan lebih sistematis dan informatif, sehingga mampu menggambarkan keterkaitan antara penggunaan sumber daya dengan hasil yang dicapai. Hal ini turut berkontribusi terhadap terjaganya capaian nilai BB selama empat tahun berturut-turut.

Memasuki Tahun 2025, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berhasil meningkatkan capaian nilai SAKIP menjadi kategori A. Peningkatan ini menunjukkan adanya lompatan kualitas dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, terutama pada aspek keterpaduan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang semakin matang.

Capaian nilai A pada Tahun 2025 mencerminkan bahwa berbagai upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya telah membuahkan hasil. Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP dilakukan secara lebih optimal, sehingga kelemahan yang sebelumnya masih ditemukan pada kategori BB dapat diminimalkan.

Perubahan capaian dari BB menjadi A juga menunjukkan meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran DPMPTSP dalam membangun budaya kerja berbasis kinerja dan hasil. Penguatan peran monitoring dan evaluasi kinerja menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas organisasi.

Secara keseluruhan, tren capaian nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2025 menunjukkan arah peningkatan yang positif. Keberhasilan mencapai kategori A pada Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di masa mendatang secara berkelanjutan.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra

Capaian nilai SAKIP DPMPTSP merupakan indikator kinerja dari sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabiliktas Kinerja DPMPTSP. Persentase capaian kinerja Nilai SAKIP DPMPTSP Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra

Capaian Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD/Renstra	Persentase terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra
A	BB	100%

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Perbandingan capaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2025 menunjukkan adanya konsistensi kinerja yang baik dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2024, nilai SAKIP DPMPTSP berada pada kategori BB, yang mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah diterapkan dengan cukup baik dan memenuhi sebagian besar kriteria penilaian.

Capaian nilai BB secara berkelanjutan pada tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki fondasi manajemen kinerja yang relatif stabil. Perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja telah berjalan sesuai dengan ketentuan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas dan penyempurnaan pada beberapa aspek manajemen kinerja.

Pada periode tersebut, DPMPTSP secara konsisten melakukan perbaikan terhadap sistem perencanaan dan pengukuran kinerja. Penyelarasan antara dokumen perencanaan, indikator kinerja, serta program dan kegiatan terus diupayakan agar kinerja organisasi lebih terarah dan terukur. Upaya ini menjadi dasar penting dalam menjaga konsistensi capaian nilai SAKIP.

Peningkatan kualitas pelaporan kinerja juga menjadi fokus perbaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan kinerja disusun dengan lebih sistematis dan informatif, sehingga mampu menggambarkan keterkaitan antara penggunaan sumber daya dengan hasil yang dicapai. Hal ini turut berkontribusi terhadap terjaganya capaian nilai BB selama empat tahun berturut-turut.

Memasuki Tahun 2025, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berhasil meningkatkan capaian nilai SAKIP menjadi kategori A. Peningkatan ini menunjukkan adanya lompatan kualitas dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, terutama pada aspek keterpaduan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang semakin matang.

Capaian nilai A pada Tahun 2025 mencerminkan bahwa berbagai upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya telah membuahkan hasil. Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP dilakukan secara lebih optimal, sehingga kelemahan yang sebelumnya masih ditemukan pada kategori BB dapat diminimalkan.

Perubahan capaian dari BB menjadi A juga menunjukkan meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran DPMPTSP dalam membangun budaya kerja berbasis kinerja dan hasil. Penguatan peran monitoring dan evaluasi kinerja menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas organisasi.

Secara keseluruhan, tren capaian nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2025 menunjukkan arah peningkatan yang positif. Keberhasilan mencapai kategori A pada Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di masa mendatang secara berkelanjutan.

D. Informasi/Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan peningkatan kinerja pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ditandai dengan capaian Nilai SAKIP kategori A, melampaui target yang ditetapkan sebesar BB. Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan secara konsisten sejak tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu faktor utama keberhasilan tersebut adalah semakin baiknya kualitas perencanaan kinerja. Penyusunan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target telah diselaraskan dengan tugas dan fungsi organisasi serta dokumen perencanaan daerah, sehingga arah kebijakan dan pelaksanaan program menjadi lebih fokus dan terukur.

Peningkatan kinerja juga didorong oleh penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Melalui evaluasi internal yang rutin, DPMPTSP dapat mengidentifikasi capaian, permasalahan, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan kinerja dapat dikendalikan dengan lebih efektif.

Selain itu, kualitas pelaporan kinerja mengalami peningkatan yang signifikan. Laporan kinerja tidak hanya menyajikan capaian output, tetapi juga mulai menekankan keterkaitan antara penggunaan sumber daya dengan hasil dan manfaat yang dicapai, sehingga mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja yang lebih substansial.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP pada tahun-tahun sebelumnya, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai alternatif solusi untuk menutup celah kelemahan yang masih ada. Solusi tersebut diarahkan pada penyempurnaan sistem manajemen kinerja agar lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja:

- Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara konsisten.
- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang selaras antara sasaran, indikator, dan program kegiatan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan.
- Penyusunan laporan kinerja yang lebih analitis dan informatif.
- Tindak lanjut yang optimal terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan:

- Penyempurnaan dokumen perencanaan dan indikator kinerja agar lebih terukur dan relevan.
- Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi internal kinerja.
- Peningkatan kualitas pelaporan kinerja sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan.
- Peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip SAKIP dan manajemen kinerja.
- Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

E. Informasi/Analisis Upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan kinerja ke depan pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk mempertahankan capaian Nilai SAKIP kategori A sekaligus meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan. Pencapaian tersebut menjadi dasar penting bagi organisasi untuk tidak hanya menjaga konsistensi kinerja, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola kinerja yang lebih matang dan berorientasi pada hasil.

Perbaikan kinerja ke depan akan difokuskan pada penguatan kualitas perencanaan kinerja agar semakin selaras antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan program kegiatan. Penyusunan perencanaan akan terus disempurnakan dengan memastikan bahwa setiap indikator memiliki keterkaitan langsung dengan outcome yang ingin dicapai, sehingga arah pelaksanaan kinerja menjadi lebih terukur dan berdampak.

Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja akan menjadi perhatian utama. Monitoring kinerja tidak hanya dilakukan untuk melihat tingkat pencapaian target, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kinerja secara lebih dini, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan.

Upaya perbaikan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ke depan akan lebih menekankan pada pencapaian hasil dan manfaat, bukan hanya pada realisasi kegiatan dan anggaran. Dengan demikian, kinerja yang dihasilkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih nyata bagi organisasi dan pemangku kepentingan.

Peningkatan kualitas pelaporan kinerja akan terus dilakukan agar laporan yang disusun semakin informatif, akurat, dan analitis. Laporan kinerja diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat manajemen untuk evaluasi dan pengambilan keputusan strategis.

Dari sisi sumber daya manusia, perbaikan kinerja ke depan akan didukung melalui peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur terhadap sistem akuntabilitas kinerja. Pembinaan dan pendampingan terkait penerapan SAKIP akan terus dilakukan agar seluruh jajaran memiliki pemahaman yang seragam dan komprehensif.

Selain itu, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau akan memperkuat pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP dan evaluasi kinerja internal sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Setiap

rekomendasi evaluasi akan ditindaklanjuti secara sistematis dan terukur agar kelemahan yang ada dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, upaya perbaikan kinerja ke depan diharapkan mampu menjaga konsistensi capaian akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sekaligus meningkatkan kualitas manajemen kinerja organisasi. Dengan perbaikan yang terencana dan berkelanjutan, DPMPTSP diharapkan dapat terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

F. Informasi/Analisis tentang Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan

Dalam upaya pencapaian indikator Nilai SAKIP DPMPTSP tahun 2025, DPMPTSP melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun program yang mendukung pencapaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Program yang mendukung Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Program	Pagu (Rp)	Realisasi	(%)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.226.638.966	13.998.637.104	98,24

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan program utama yang mendukung pencapaian indikator meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Program ini berperan strategis dalam memastikan tersedianya dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, serta sarana prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP secara keseluruhan.

Pada Tahun 2025, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki pagu anggaran sebesar Rp14.226.638.966 dengan realisasi sebesar Rp13.998.637.104 atau mencapai 98,24 persen. Tingkat realisasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik dan sebagian besar anggaran dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Capaian realisasi anggaran tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Anggaran program penunjang dimanfaatkan untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kinerja dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi.

Dari sisi efisiensi, realisasi anggaran yang mendekati pagu tanpa mencapai 100 persen menunjukkan adanya pengendalian belanja yang baik. DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mampu menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga potensi pemborosan anggaran dapat diminimalkan.

Program ini juga memberikan kontribusi penting dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan DPMPTSP. Dukungan administrasi dan manajerial yang memadai memungkinkan perangkat daerah untuk fokus pada pencapaian sasaran strategis, termasuk peningkatan nilai SAKIP.

Selain itu, pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi turut memperkuat sistem akuntabilitas kinerja melalui penyediaan sarana pendukung kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja. Dengan dukungan tersebut, proses pengendalian dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Tingginya tingkat realisasi anggaran program ini juga menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja yang baik.

Keterkaitan antara pelaksanaan program penunjang dengan capaian indikator akuntabilitas kinerja terlihat dari meningkatnya kualitas pelaporan dan pengelolaan kinerja organisasi. Program ini menjadi fondasi yang mendukung terciptanya sistem manajemen kinerja yang lebih tertib dan akuntabel.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2025 telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Dengan realisasi anggaran yang tinggi dan pemanfaatan yang efektif, program ini menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam keberhasilan pencapaian nilai SAKIP kategori A pada Tahun 2025.

G. Informasi/Analisis atas efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Seluruh sumber daya yang tersedia diarahkan secara terencana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian indikator Nilai SAKIP.

Dari aspek anggaran, efektivitas penggunaan sumber daya tercermin dari tingginya tingkat realisasi anggaran pada program pendukung akuntabilitas kinerja, khususnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Realisasi anggaran yang mendekati pagu menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi penggunaan anggaran terlihat dari kemampuan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan tanpa harus menghabiskan seluruh pagu anggaran. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian belanja yang baik serta pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran untuk mendukung peningkatan kualitas manajemen kinerja.

Pada aspek sumber daya manusia, efektivitas pemanfaatan aparatur ditunjukkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, monitoring, dan pelaporan kinerja. Aparatur yang terlibat dalam pengelolaan SAKIP mampu melaksanakan tugasnya secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Efisiensi sumber daya manusia juga tercermin dari meningkatnya kualitas kinerja tanpa adanya penambahan jumlah pegawai secara signifikan. Optimalisasi peran aparatur serta peningkatan pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

Pemanfaatan teknologi informasi turut berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Sistem informasi dan aplikasi pendukung pelaporan kinerja membantu mempercepat proses pengumpulan data, pengolahan informasi, serta penyusunan laporan kinerja secara lebih akurat dan tepat waktu.

Dari sisi sarana dan prasarana, penggunaan fasilitas pendukung dilakukan secara optimal untuk menunjang kelancaran proses administrasi dan pengelolaan kinerja. Meskipun terdapat keterbatasan fasilitas, pengelolaan yang efisien memungkinkan seluruh proses akuntabilitas kinerja tetap berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 telah mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja. Dengan pengelolaan sumber daya yang tepat dan terarah, DPMPTSP mampu mencapai kinerja yang optimal serta mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

B. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang dilaporkan ke pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Capaian Kinerja suatu organisasi dapat diukur dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja dengan realisasi pada setiap periode. Dalam dokumen Lakip, capaian kinerja diukur setiap tahunnya untuk dapat menjadi gambaran terhadap pencapaian organisasi selama satu tahun, dan juga merupakan bahan evaluasi untuk pencapaian target pada tahun yang akan datang. Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, dapat digambarkan dalam tabel Skala interval sebagai berikut:

Tabel 3.17 Skala Interval Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LAKIP Tahun 2025

Skor	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	*2*	*3*
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Baik
2	76 % ≤ 90 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	50 % ≤	Sangat Rendah

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Tingkat capaian sasaran strategis 1 "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal" ditunjukkan dengan Indikator Kinerja yaitu Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Berdasarkan ke dua indikator diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sudah berhasil mencapai sasaran strategis 1 Tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kategori
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Miliar Rupiah	47.700	64.675	135,59	Sangat Baik

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Penjelasan dari capaian masing-masing Indikator tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini :

A. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif, khususnya pada sasaran strategis meningkatnya realisasi penanaman modal. Berdasarkan Dokumen

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, indikator Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN ditetapkan dengan target sebesar 47.700 miliar rupiah. Realisasi yang dicapai hingga akhir tahun 2025 tercatat sebesar 64.675 miliar rupiah, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan.

Secara kuantitatif, capaian tersebut menghasilkan tingkat kinerja sebesar 135,59 persen dan dikategorikan sangat baik. Persentase ini mencerminkan adanya kelebihan capaian sebesar 16.975 miliar rupiah dibandingkan target perjanjian kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2025 berada dalam tren yang sangat kondusif dan mampu menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tingginya realisasi investasi tersebut tidak terlepas dari posisi strategis Provinsi Kepulauan Riau yang berada di jalur perdagangan internasional serta berdekatan langsung dengan negara-negara mitra ekonomi utama seperti Singapura dan Malaysia. Keunggulan geografis ini menjadi daya tarik utama bagi investor PMA, khususnya pada sektor industri pengolahan, logistik, dan kawasan industri yang berkembang pesat di wilayah ini.

Selain faktor geografis, kebijakan pemerintah daerah yang proaktif dalam mendorong kemudahan berusaha juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan realisasi investasi. DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten melakukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerapan sistem perizinan berbasis elektronik serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelaku usaha.

Optimalisasi peran pelayanan terpadu satu pintu turut mempercepat proses perizinan dan menekan biaya transaksi yang harus ditanggung oleh investor. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan waktu bagi pelaku usaha, sehingga meningkatkan kepercayaan investor untuk merealisasikan rencana penanaman modalnya di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2025.

Capaian realisasi investasi yang melampaui target juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan promosi investasi yang dilakukan oleh DPMPTSP. Kegiatan promosi yang terarah, baik melalui forum bisnis, kerja sama antar daerah, maupun fasilitasi investor potensial,

mampu menghasilkan komitmen investasi yang kemudian direalisasikan dalam bentuk kegiatan usaha nyata.

Dari sisi PMDN, peningkatan realisasi investasi menunjukkan tumbuhnya kepercayaan pelaku usaha nasional terhadap stabilitas ekonomi daerah dan prospek usaha di Kepulauan Riau. Kondisi ini menandakan bahwa kebijakan daerah tidak hanya menarik investor asing, tetapi juga mampu mendorong partisipasi aktif investor dalam negeri untuk mengembangkan usahanya.

Realisasi investasi yang tinggi juga berdampak langsung pada pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi. Masuknya investasi baru dan ekspansi usaha yang telah ada berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja lokal serta peningkatan pendapatan masyarakat di berbagai sektor ekonomi.

Dari perspektif akuntabilitas kinerja, capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan target dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 telah disusun secara realistis dan mampu direspons secara optimal melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Kinerja yang melampaui target menjadi indikator bahwa strategi yang diterapkan berjalan efektif.

Meskipun demikian, capaian yang sangat tinggi ini perlu dicermati secara berkelanjutan agar kualitas investasi yang masuk tetap terjaga. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa investasi yang terealisasi memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, berwawasan lingkungan, serta sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Keberhasilan pencapaian realisasi investasi tahun 2025 juga menjadi modal penting bagi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dalam menetapkan target dan strategi pada tahun-tahun berikutnya. Pengalaman dan praktik baik yang telah dilakukan dapat dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

Di sisi lain, capaian ini menunjukkan adanya potensi untuk melakukan penyesuaian target kinerja di masa mendatang agar lebih mencerminkan kapasitas riil dan peluang investasi yang ada di daerah. Dengan demikian, target yang ditetapkan ke depan dapat semakin menantang namun tetap terukur.

Secara keseluruhan, capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 yang mencapai 135,59 persen dari target Perjanjian Kinerja Perubahan menunjukkan kinerja DPMPTSP yang sangat baik. Hasil ini menegaskan peran strategis DPMPTSP dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat posisi Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu tujuan investasi unggulan di tingkat nasional.

B. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian nilai realisasi investasi 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Bintan	6,115,230,740,000	3,453,412,675,000	3,035,173,940,000	12,224,094,439,071	18,227,343,835,527
Kabupaten Karimun	2,699,705,800,000	545,276,575,000	551,479,540,000	8,914,126,105,018	1,311,497,381,313
Kabupaten Kepulauan Anambas	65,472,000,000	19,552,310,000	186,089,800,000	28,910,503,471	81,202,227,923
Kabupaten Lingga	293,771,360,000.00	539,223,370,000	50,117,420,000.00	86,495,655,856	195,679,626,147
Kabupaten Natuna	44,020,400,000	21,986,550,000	117,097,140,000	63,212,116,588	40,069,162,952
Kota Batam	14,880,793,760,000	13,238,638,175,000	15,620,980,040,000	25,462,026,953,034	44,193,463,473,871
Kota Tanjung Pinang	907,499,940,000	402,827,100,000	603,934,640,000	482,959,713,905	626,279,468,150
Grand Total	**25,006,494,000,000**	**18,220,916,755,000**	**20,164,872,520,000**	**47,261,825,486,943**	**64,675,535,175,883**

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau mengalami tren pertumbuhan yang signifikan sepanjang periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, total realisasi investasi di Kepri tercatat Rp25,006 miliar, kemudian turun menjadi Rp18,220 miliar pada 2022 dan naik kembali pada 2023 menjadi Rp20,165 miliar. Lonjakan yang paling luar biasa terjadi pada 2024, ketika realisasi investasi mencapai Rp47,262 triliun, dan semakin meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp64,675 triliun. Data ini menunjukkan momentum pertumbuhan investasi yang semakin kuat di Kepri dari tahun ke tahun, terutama sejak 2024-2025.

Perbandingan tahunan memperlihatkan bahwa realisasi investasi tahun 2025 mencapai nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Realisasi Rp64,675 triliun pada 2025 lebih tinggi sekitar 37 persen dibanding 2024 dan bahkan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan realisasi 2021 Rp25,006 miliar. Kenaikan tersebut memperlihatkan peningkatan kepercayaan investor dan dinamika investasi yang terus berkembang di wilayah Kepri, terutama di

kawasan-kawasan strategis seperti Batam, yang menjadi motor utama investasi di provinsi ini.

Kenaikan realisasi investasi selama 2025 juga sejalan dengan tren nasional. Secara agregat di tingkat nasional, realisasi investasi Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp1.714 triliun, tumbuh lebih dari 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan juga melampaui target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di daerah, termasuk di Kepulauan Riau, bergerak searah dengan iklim investasi nasional yang tetap kuat meskipun tantangan global masih berlangsung.

Salah satu kontributor utama dari capaian investasi provinsi ini adalah Kota Batam, yang pada tahun 2025 mencatat realisasi investasi riil sebesar sekitar Rp69,30 triliun, bahkan melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp60 triliun. Hal ini menunjukkan Batam tetap menjadi magnet investasi karena posisi strategisnya sebagai zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang menarik investor dari Singapura, Taiwan, Tiongkok, Malaysia dan negara-negara lainnya.

Selain itu, data historis menunjukkan bahwa pada periode 2021–2024, investasi di Kepri terus menunjukkan pergerakan yang positif meskipun pernah mengalami penurunan pada 2022. Realisasi investasi pada 2021–2023 telah menunjukkan bahwa Kepri sebagai kawasan penanaman modal memiliki daya tarik tersendiri, terutama dalam sektor industri, properti dan jasa yang memberikan kontribusi besar terhadap masuknya investasi PMA dan PMDN. Data tersebut juga mencatat tren peningkatan jumlah proyek investasi yang berdampak pada perluasan fasilitas industri dan peluang kerja di wilayah Kepri.

Kontribusi realisasi investasi 2025 yang mencapai Rp64,675 triliun juga berkaitan dengan perkembangan ekonomi Kepri secara keseluruhan. Laju pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat menonjol pada tahun 2025, dengan pertumbuhan yang bahkan menjadi salah satu tertinggi di Sumatera, tercatat sebesar 7,48 persen pada Triwulan III 2025. Pertumbuhan ekonomi ini turut mendorong kepercayaan investor untuk memperluas kegiatan usahanya di provinsi ini.

Perbandingan antar tahun juga menunjukkan dinamika struktural investasi di wilayah tersebut. Realisasi investasi yang meningkat tajam pada 2024 dan 2025 tidak hanya mencerminkan pergerakan angka, tetapi juga mencerminkan perbaikan dalam pelayanan

perizinan dan iklim usaha yang lebih kondusif. Hal ini tentu saja menjadi sinyal positif bagi para pelaku usaha dan investor bahwa Kepulauan Riau terus memperkuat daya saingnya di panggung investasi regional maupun nasional.

Secara keseluruhan, capaian realisasi investasi di Kepulauan Riau pada 2025 menunjukkan bahwa target investasi tidak hanya tercapai, tetapi jauh melampaui angka yang diharapkan dari tren perencanaan awal. Peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan stabilitas perkembangan investasi yang sehat dan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah serta menunjukkan efektivitas program fasilitasi dan promosi investasi oleh pemerintah daerah.

Dengan kinerja yang sangat kuat pada tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau dapat menempatkan dirinya sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan investasi tercepat di Indonesia, meskipun belum berada di puncak daftar nasional. Pertumbuhan ini menunjukkan perbaikan signifikan dan konsistensi dalam menarik modal investasi yang berkelanjutan, yang diharapkan semakin memperkuat peran investasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, capaian realisasi investasi pada tahun 2025 merupakan bukti bahwa strategi pembangunan dan kebijakan investasi yang diterapkan di Kepulauan Riau mampu menarik investor dan mendorong realisasi proyek-proyek investasi secara efektif, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra

Capaian nilai realisasi investasi PMA dan PMDN merupakan indikator kinerja dari sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal. Persentase capaian kinerja Nilai Investasi PMA dan PMDN Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra

Capaian Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD/Renstra	Persentase terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra
64.675 Miliar	124.298 Miliar	52,03 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Berdasarkan perbandingan antara capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dengan target akhir RPJMD/Renstra Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026, dapat diketahui bahwa realisasi investasi yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) telah mencapai nilai sebesar 64,675 miliar rupiah. Sementara itu, target akhir yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah sebesar 124,298 miliar rupiah. Dengan demikian, capaian kinerja hingga tahun 2025 berada pada angka 52,03 persen terhadap target akhir RPJMD/Renstra.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara kumulatif, hingga tahun kelima pelaksanaan RPJMD/Renstra, realisasi investasi telah melampaui setengah dari target yang ditetapkan untuk periode enam tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan realisasi penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui kebijakan dan program yang mendukung iklim investasi, telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Capaian ini juga mencerminkan daya tarik Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah strategis tujuan investasi di tingkat nasional.

Perlu dicermati bahwa periode RPJMD/Renstra Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 disusun untuk jangka waktu enam tahun, berbeda dengan pola umum perencanaan yang lazimnya berdurasi lima tahun. Pembagian target dalam enam tahun tersebut berimplikasi pada distribusi capaian yang tidak selalu bersifat linier setiap tahunnya. Oleh karena itu, capaian sebesar 52,03 persen hingga tahun 2025 dapat dinilai relatif sejalan dengan tahapan waktu pelaksanaan Renstra/RPJMD yang masih menyisakan satu tahun pelaksanaan pada tahun 2026.

Dari perspektif kinerja sasaran strategis, capaian realisasi investasi tahun 2025 ini menunjukkan bahwa arah kebijakan peningkatan penanaman modal telah berjalan sesuai dengan koridor perencanaan yang ditetapkan. Meski demikian, masih terdapat selisih capaian sebesar 47,97 persen yang perlu dikejar agar target akhir RPJMD/Renstra dapat terpenuhi

secara optimal. Hal ini menuntut adanya penguatan strategi dan akselerasi realisasi investasi pada sisa periode perencanaan.

Kondisi tersebut sekaligus menggambarkan tantangan yang harus dihadapi pada tahun terakhir RPJMD/Renstra, yaitu memastikan agar potensi investasi yang telah terbangun, baik melalui promosi, kemudahan perizinan, maupun peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, dapat terealisasi secara konkret dalam bentuk nilai investasi. Fokus kebijakan perlu diarahkan pada sektor-sektor unggulan dan proyek strategis yang memiliki potensi realisasi tinggi dalam jangka pendek.

Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi investasi tahun 2025 dengan target akhir RPJMD/Renstra Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik dan berada pada jalur yang positif. Capaian lebih dari separuh target akhir ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pada tahun 2026, sehingga sasaran strategis meningkatnya realisasi penanaman modal dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Selain memiliki target daerah yang tercantum dalam Dokumen Renstra DPMPTSP dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, pengukuran kinerja capaian nilai realisasi investasi juga berdasarkan target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM. Capaian kinerja indikator Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berdasarkan target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Tahun 2025 dengan Target Nasional

Capaian Realisasi 2025	Target Nasional	Kinerja
64.675 Miliar	57.890 Miliar	111,71 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 tercatat sebesar 64,675 miliar rupiah, sementara target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 57,890 miliar rupiah. Dengan demikian, kinerja realisasi investasi

Provinsi Kepulauan Riau mencapai 111,71 persen dari target nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya mampu memenuhi target yang diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi juga berhasil melampauinya secara signifikan.

Secara nasional, realisasi investasi Indonesia tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan siaran pers Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi nasional sepanjang tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan, didorong oleh peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan, hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan investasi domestik. Kondisi ini menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan dampak positif bagi daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Riau, dalam mendorong realisasi penanaman modal.

Capaian realisasi investasi Kepulauan Riau yang melampaui target nasional juga mencerminkan posisi strategis provinsi ini dalam peta investasi nasional. Keunggulan geografis yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, keberadaan kawasan industri dan kawasan perdagangan bebas, serta dukungan infrastruktur yang relatif memadai menjadi faktor penarik utama bagi investor. Hal ini sejalan dengan data BKPM yang menunjukkan bahwa Kepulauan Riau secara konsisten menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi investasi yang cukup besar di wilayah Sumatera.

Selain itu, keberhasilan ini juga tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang penanaman modal. Sinkronisasi program daerah dengan arah kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, khususnya dalam percepatan perizinan berusaha, promosi investasi, serta fasilitasi investor, turut mendorong tingginya realisasi investasi di Kepulauan Riau. Kinerja ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional dapat diimplementasikan seara efektif di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 yang mencapai 111,71 persen terhadap target nasional menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan kontribusi nyata daerah terhadap pencapaian target investasi nasional. Capaian ini dapat menjadi dasar evaluasi positif serta pijakan strategis bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja investasi pada tahun-tahun berikutnya, sejalan dengan arah pembangunan dan kebijakan penanaman modal nasional.

F. Informasi/Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 yang mampu melampaui target nasional dan menunjukkan tren positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tidak terlepas dari kombinasi faktor kebijakan, kondisi wilayah, serta peran aktif perangkat daerah terkait, khususnya DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum, peningkatan kinerja investasi mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Faktor-faktor utama yang mendorong keberhasilan capaian investasi antara lain:

- Posisi strategis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, sehingga menjadi pintu gerbang investasi asing dan kawasan logistik regional.
- Keberadaan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan perdagangan bebas seperti Batam, Bintan, dan Karimun yang memberikan daya tarik tinggi bagi investor.
- Dukungan kebijakan nasional, khususnya kebijakan hilirisasi dan kemudahan berusaha yang dicanangkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- Stabilitas ekonomi daerah serta ketersediaan infrastruktur dasar yang relatif memadai untuk mendukung kegiatan investasi.
- Meningkatnya minat investor pada sektor industri pengolahan, jasa, logistik, dan pariwisata yang menjadi sektor unggulan di Kepulauan Riau.

Dalam mendukung keberhasilan tersebut, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berperan aktif melalui berbagai upaya strategis, antara lain:

- Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepastian hukum bagi investor.

- Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal melalui penyederhanaan prosedur, transparansi informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.
- Pelaksanaan promosi investasi daerah secara berkelanjutan, baik melalui forum investasi, pameran, maupun kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pelaku usaha.
- Fasilitasi dan pendampingan investor sejak tahap perencanaan hingga realisasi investasi, termasuk penyelesaian kendala perizinan dan nonperizinan.
- Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi vertikal guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan investasi.

Selain faktor keberhasilan, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan berbagai alternatif solusi untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi hambatan dalam pencapaian investasi, antara lain:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi investasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan investasi.
- Meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan strategis nasional di bidang penanaman modal.
- Mendorong perbaikan iklim investasi melalui pemberian informasi peluang investasi yang akurat dan berbasis potensi daerah.
- Mengoptimalkan pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan program.

Secara keseluruhan, keberhasilan capaian investasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 merupakan hasil dari sinergi antara kebijakan nasional, keunggulan daerah, serta upaya terstruktur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Upaya-upaya tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan dan peningkatan kinerja investasi pada tahun-tahun mendatang.

F. Informasi/Analisis Upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka menjaga kesinambungan serta meningkatkan kinerja penanaman modal pada tahun-tahun selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui DPMPTSP perlu melakukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Upaya perbaikan ini diarahkan untuk menjawab tantangan yang masih dihadapi, sekaligus mengoptimalkan potensi daerah agar capaian investasi tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.

Upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan ke depan antara lain:

- Penguatan kualitas pelayanan perizinan berusaha melalui peningkatan keandalan layanan OSS berbasis risiko, termasuk pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan perizinan.
- Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, agar mampu memberikan pelayanan yang responsif, akurat, dan berorientasi pada kepuasan investor.
- Penguatan promosi investasi yang lebih terarah dan berbasis potensi unggulan daerah, dengan menyusun profil peluang investasi yang spesifik per sektor dan wilayah.
- Optimalisasi fasilitasi pasca-izin melalui pemantauan realisasi investasi dan penyelesaian hambatan yang dihadapi investor selama tahap konstruksi maupun operasional.
- Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, dan kepastian regulasi.

Selain itu, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau juga akan mendorong perbaikan dari sisi tata kelola dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program penanaman modal dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika ekonomi.

Upaya pendukung lainnya yang akan dilakukan meliputi:

- Penguatan sistem informasi penanaman modal untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, serta kemudahan akses informasi bagi investor dan pemangku kepentingan.
- Peningkatan peran daerah dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya terkait hilirisasi industri, pengembangan kawasan strategis, dan investasi berkelanjutan.
- Mendorong kemitraan antara investor besar dengan pelaku usaha lokal dan UMKM guna meningkatkan dampak investasi terhadap perekonomian daerah.
- Penguatan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan program penanaman modal di masa mendatang.

Upaya perbaikan kinerja ke depan diharapkan mampu memperkuat daya saing investasi Provinsi Kepulauan Riau, menjaga kepercayaan investor, serta mendorong realisasi investasi yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan arah pembangunan daerah dan kebijakan penanaman modal nasional.

G. Informasi/Analisis tentang Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan

Dalam upaya pencapaian indikator capaian realisasi investasi tahun 2025, DPMPTSP melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun program yang mendukung pencapaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Program yang mendukung Indikator Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Program	Pagu (Rp)	Realisasi	(%)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	348.266.180	343.536.124	98,64
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	219.614.350	202.641.291	92.27
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	348.266.180	343.536.124	98.64
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	348.266.180	343.536.124	98,64
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	51.106.895	48,201,398	94.31
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	13.707.100	13.517.645	98.62

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepri, 2025

Dalam upaya mencapai indikator meningkatnya realisasi penanaman modal tahun 2025, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan berbagai program yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung seluruh tahapan penanaman modal, mulai dari pelayanan, pengembangan iklim investasi, promosi, hingga pengendalian dan pengelolaan data. Secara umum, tingkat penyerapan anggaran pada program-program tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Program Pelayanan Penanaman Modal menjadi salah satu program utama dengan pagu anggaran sebesar 348.266.180 rupiah dan realisasi sebesar 343.536.124 rupiah atau 98,64 persen. Tingginya tingkat realisasi anggaran pada program ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada pelaku usaha dapat dilaksanakan secara optimal. Program ini berperan penting dalam menciptakan kemudahan berusaha dan memberikan kepastian layanan, yang pada akhirnya mendorong percepatan realisasi investasi di daerah.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki pagu sebesar 219.614.350 rupiah dengan realisasi sebesar 202.641.291 rupiah atau 92,27 persen. Meskipun persentase realisasi sedikit lebih rendah dibandingkan program lainnya, capaian ini tetap menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang efektif. Program ini berfokus pada penciptaan kondisi yang kondusif bagi investor, melalui penyusunan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi penyelesaian hambatan investasi.

Selanjutnya, Program Promosi Penanaman Modal juga menunjukkan kinerja anggaran yang sangat baik dengan tingkat realisasi sebesar 98,64 persen. Tingginya realisasi anggaran ini mencerminkan keseriusan DPMPTSP dalam melakukan promosi potensi dan peluang investasi Provinsi Kepulauan Riau, baik kepada investor dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan promosi yang dilaksanakan secara terarah mampu meningkatkan minat investor dan mendorong terealisasinya komitmen investasi.

Program Pelayanan Penanaman Modal yang kembali tercantum dalam daftar program pendukung menunjukkan konsistensi fokus DPMPTSP pada peningkatan kualitas layanan investasi. Pengulangan program ini menegaskan bahwa pelayanan menjadi tulang

punggung dalam strategi peningkatan realisasi penanaman modal. Dengan realisasi anggaran yang tinggi, program ini berkontribusi langsung terhadap kepercayaan investor dan kelancaran proses investasi.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki pagu sebesar 51.106.895 rupiah dengan realisasi 48.201.398 rupiah atau 94,31 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi berjalan cukup optimal. Melalui program ini, DPMPTSP dapat memantau perkembangan realisasi investasi, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mencatat realisasi sebesar 98,62 persen dari pagu 13.707.100 rupiah. Tingginya tingkat realisasi anggaran pada program ini mencerminkan pentingnya dukungan data dan sistem informasi yang akurat dalam pengambilan kebijakan penanaman modal. Ketersediaan data yang valid dan mutakhir menjadi dasar dalam perencanaan, evaluasi, dan promosi investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada program-program pendukung indikator meningkatnya realisasi penanaman modal tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Pelaksanaan program yang terintegrasi antara pelayanan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian, serta pengelolaan data telah memberikan kontribusi nyata terhadap capaian realisasi investasi yang melampaui target. Hal ini menegaskan bahwa dukungan program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan selaras dengan tujuan strategis pembangunan daerah di bidang penanaman modal.

H. Informasi/Analisis atas efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pencapaian kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta pemanfaatan sistem dan teknologi informasi. Sepanjang tahun 2025, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berupaya memastikan bahwa seluruh sumber daya tersebut digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dari sisi sumber daya manusia, efektivitas ditunjukkan melalui penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan tugas yang diemban, khususnya pada unit-unit pelayanan perizinan dan penanaman modal. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pembaruan pemahaman terhadap regulasi penanaman modal dan sistem OSS berbasis risiko. Dengan jumlah aparatur yang relatif terbatas, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mampu tetap memberikan layanan yang responsif dan tepat waktu, sehingga mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan tenaga kerja.

Efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari capaian realisasi program dan kegiatan yang relatif tinggi serta selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan realisasi investasi, seperti pengelolaan sistem informasi, promosi penanaman modal, dan fasilitasi investor. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis DPMPTSP.

Dari aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan fasilitas kerja dilakukan secara optimal dengan menyesuaikan kebutuhan pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang ada. Pemanfaatan ruang kerja, peralatan perkantoran, serta infrastruktur teknologi informasi diarahkan untuk mendukung kelancaran proses pelayanan tanpa menimbulkan pemborosan. Penggunaan sistem perizinan elektronik dan komunikasi digital juga mengurangi ketergantungan pada proses manual, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Integrasi layanan melalui OSS serta penggunaan sistem pendukung pengelolaan data penanaman modal memungkinkan proses pelayanan dan pelaporan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja internal organisasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses layanan perizinan.

Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tercermin dari kemampuan organisasi dalam mencapai target kinerja dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan sumber

daya yang terarah, berbasis prioritas, dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta pencapaian realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

C. Analisis Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan Indikator SMART

Pengukuran kinerja instansi Pemerintah selalunya menggunakan parameter dan ukuran sebagaimana yang ditetapkan dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan melalui peraturan dan perundang-undangan. Patokan kinerja berdasarkan capaian kinerja dibandingakn dengan target yang telah ditatapkan baik dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah maupun Dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi. Untuk melakukan analisis terhadap capaian kinerja, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode SMART yang memilkiki Tujuan yang Spesifik dan Terukur (Specific and Measurable), dapat diraih/realistis (Attainable), relevan dan berjangka waktu (Relevant and Timely). Tujuan yang dirumuskan dalam metode SMART sebagai sasaran yang terukur terhadap capaian target yang ditetapkan.

Tabel 3.23 Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis I

No	Indikator	Analisis
1	Spesific	Indikator secara jelas mengukur peningkatan nilai realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri yang benar-benar terealisasi di Provinsi Kepulauan Riau sebagai hasil fasilitasi dan pelayanan DPMPTSP.
2	Measurable	Indikator diukur secara kuantitatif dalam satuan miliar rupiah berdasarkan data realisasi investasi yang dilaporkan dan tervalidasi melalui sistem resmi penanaman modal.
3	Attainable	Target yang ditetapkan dapat dicapai secara realistis karena disusun dengan mempertimbangkan potensi investasi daerah, tren investasi tahun sebelumnya, serta kapasitas kelembagaan dan pelayanan DPMPTSP.
4	Relevant	Indikator ini sangat relevan dengan tujuan pembangunan daerah karena realisasi investasi berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5	Timely	Pencapaian indikator dievaluasi dalam periode satu tahun anggaran, sehingga kemajuan dan hasil kinerja dapat diukur secara jelas pada akhir tahun berjalan.

Tabel 3.24 Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis II

No	Indikator	Analisis
1	Spesific	Indikator secara spesifik menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan oleh PTSP.
2	Measurable	Indikator diukur menggunakan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan metodologi yang berlaku.
3	Attainable	Target IKM dapat dicapai melalui peningkatan standar pelayanan, penyederhanaan prosedur, pemanfaatan sistem pelayanan berbasis elektronik, serta peningkatan kompetensi aparatur pelayanan.
4	Relevant	Indikator ini relevan karena kualitas layanan PTSP menjadi faktor utama dalam menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor.
5	Timely	Pengukuran IKM dilakukan dalam periode satu tahun, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Tabel 3.25 Analisis Metode SMART pada Sasaran Strategis III

No	Indikator	Analisis
1	Spesific	Indikator secara jelas mengukur tingkat akuntabilitas kinerja DPMPTSP melalui penilaian sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi.
2	Measurable	Indikator dinilai dalam bentuk skor atau nilai hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh instansi berwenang berdasarkan kriteria dan bobot penilaian yang terstandar.
3	Attainable	Target nilai SAKIP dapat dicapai melalui penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, peningkatan kualitas pelaporan, serta konsistensi dalam pengelolaan kinerja organisasi.
4	Relevant	Indikator ini relevan karena akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran dan pencapaian hasil pembangunan.
5	Timely	Penilaian SAKIP dilakukan setiap tahun, sehingga pencapaian indikator dapat dievaluasi secara periodik dan dijadikan dasar peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP selama satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Secara umum, kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, khususnya dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya realisasi penanaman modal. Capaian realisasi investasi yang melampaui target Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 mencerminkan efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Provinsi Kepulauan Riau.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau terus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi. Hal ini diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja, peningkatan kualitas pelaporan, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

Akhirnya, LAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kualitas pelayanan guna mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Tanjung Pinang, Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19690329 199003 1 009



dpmptsp

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KEPULAUAN RIAU